

VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Idil Akbar

Universitas Padjadajaran, Bandung, Indonesia
Email: idil.akbar@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik didalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi covid 19. Saat ini, Indonesia sedang menuju upaya untuk menyelesaikan pandemi covid 19 dengan menjalin kontrak pembelian vaksin covid 19 dengan tiga produsen vaksin asal RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Harapannya wabah covid 19 bisa tertangani segera untuk memulihkan warga dan ekonomi negara. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik dari Caporaso dan Levine, terutama dalam melihat relasi kekuasaan dan negara terhadap mekanisme pasar, sehingga akan terlihat apakah negara dan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai bagian dari solusi atau justru menciptakan masalah baru dibalik vaksinasi covid 19. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan secara sekunder dan dianalisis melalui tahapan berupa pengorganisasian data, pembacaan dan pencatatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasi, serta penafsiran.

Kata kunci: covid 19; vaksinasi; negara; pasar; ekonomi politik

Abstract

This study aims to explain how the political economy perspective views the functions of the state and government in the Covid 19 vaccination plan. Currently, Indonesia is trying to overcome the COVID-19 pandemic by entering into contracts to purchase covid 19 vaccines with three vaccine producers from China, namely Cansino, G42 . / Sinopharm and SinoVac. The hope is that the Covid 19 outbreak can be handled immediately to restore the economy and citizens. This study uses Caporaso and Levine's political economy theory, especially in looking at the relationship between power and state mechanisms against the market, so that it will be seen whether the state and the government are carrying out their functions as part of the new solution or problem behind the covid 19 vaccination. analytic descriptive. Data were analysed using the stages of organizing data, reading and recording, as well as descriptions, clarifications, and interpretations.

Keywords: covid 19; vaccination; state; market; political economy

PENDAHULUAN

Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga sebagai respon dimana semua negara berlomba-lomba memperebutkan vaksin ini agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali (Ihsanuddin, 2020).

Dalam bahasa sederhana tentang pembelian barang sebelum barang ada atau sedang berproses ini dikenal dengan istilah *ijon*. Indonesia meng-*ijon* vaksin covid 19 dari China melalui tiga perusahaan, yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Konon, vaksin dari ketiga perusahaan ini sudah melakukan tes tahap tiga di berbagai negara.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan (*game changer*) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020). Sikap optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil nantinya.

Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; Budiardjo, 2008). Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa (MacIver, 1926 dalam Budiardjo, 2008).

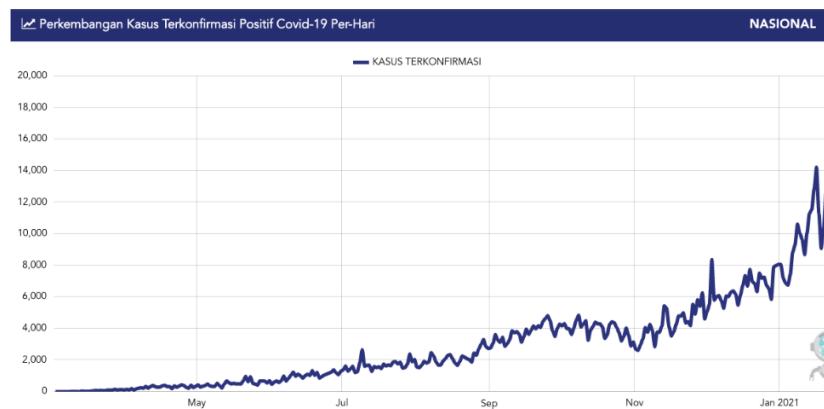
Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi

sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan (Sari, 2020) sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.

Pada pertengahan November 2020, tercatat lebih 470 ribu orang yang terkonfirmasi positif covid 19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta lebih di penghujung Januari 2021. Dari sejumlah orang yang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang (covid19.go.id, 2021).

Gambar 1.

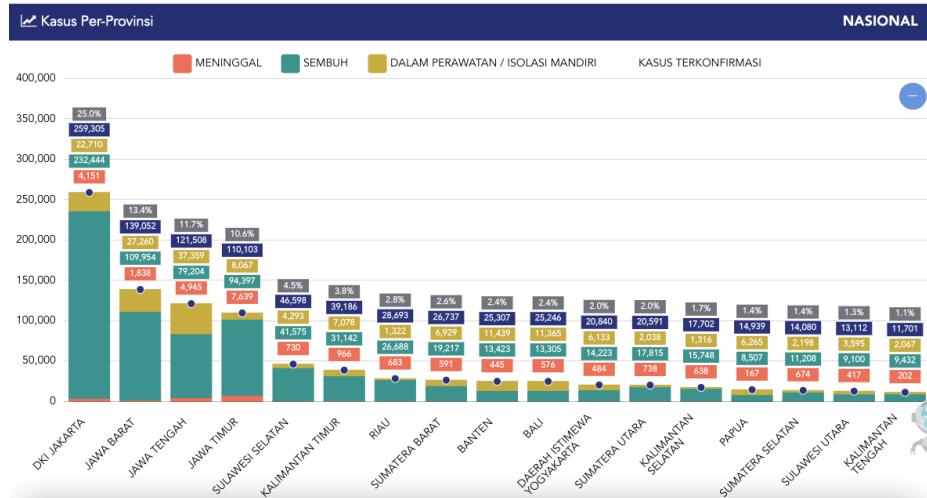
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19



Sumber: covid19.go.id

Sejauh ini, kemungkinan orang yang terkonfirmasi akan cenderung terus naik. Karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas.

Gambar 2.
Kasus Covid 19 di seluruh Indonesia



Sumber: covid19.go.id

Dengan fakta di atas, membeli vaksin dan melakukan vaksinasi covid 19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran. Namun, bagaimana respon masyarakat atas usaha pemerintah yang membeli vaksin meski masih dalam tahap uji klinis? Akhir Oktober 2020, Kemenkes RI merilis hasil survey, bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tentang respon masyarakat atas rencana melaksanakan vaksinasi covid 19. Hasilnya, 64,8% masyarakat bersedia divaksinasi, 7,6% menolak dan 26% masih ragu (CNNIndonesia, 2020).

Setiap orang sepakat bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang krusial dilakukan. Pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi ini untuk memutus rantai penyebaran covid 19. Namun, mengapa respon masyarakat tidak menyentuh angka maksimal? Katakanlah 99% (plus minus MoE jika menggunakan sampling 1% - asumsi penulis) mau divaksinasi untuk menggambarkan bahwa tidak ada penolakan dan keraguan orang Indonesia terhadap niat pemerintah memberikan vaksin covid 19 ini? Apakah orang-orang masih relatif belum meyakini sepenuhnya vaksin tersebut nanti berefek terhadap peningkatan imunitas tubuh dari serangan covid 19?

Ataukah, semua ini terkait kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah Indonesia yang lemah. Sebagaimana disampaikan Chris Miller

dalam *COVID-19 Crisis: Political and Economic Aftershocks* bahwa sejak wabah Covid-19 merebak telah terjadi krisis kepercayaan (*Problem of Trust*) warga negara terhadap kekuasaan. Miller mencontohkan sejumlah kepala negara seperti Moon Jae In (Korea Selatan), Shinzo Abe (Jepang), dan Donald Trump (AS) mendapat banyak kritik atas ketidakmampuan mereka menangani virus dan membiarkan korban terjangkit terus bertambah (Miller, 2020).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang oleh Nicholas Walliman dinilai sebagai sebuah analisis penelitian terhadap kata-kata yang berkaitan dengan ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, kebiasaan dan perilaku manusia (Walliman, 2011). Analisis yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran bagaimana perspektif ekonomi politik memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (sekunder) dengan menelaah sumber – sumber dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, dokumen, website, media, dan lain sebagainya. Sementara, teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan Creswell (2014) yang memfokuskan analisa data melalui pengorganisasian data, pembacaan dan pencatatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasi, serta penafsiran (Agustino, 2020).

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia juga mendapat banyak kritik atas penanganan covid 19, dan itu belangsung hingga ke tahap pembelian covid 19 ini. Mengapa? Sebab, kebijakan yang diambil ini terkesan tergesa-gesa tanpa disertai pembuktian empiris akan kehasiatan lanjutan vaksin. Terkesan pula bahwa ada niatan mencari keuntungan ekonomis dengan memaksakan penggunaan produk ini menggunakan tangan kekuasaan dan kepentingan negara. Benarkah demikian? Mari kita telaah sedikit untuk melihat bagaimana perspektif ekonomi politik memandang fenomena ini. Sehingga, tidak sekedar mesimplifikasi persoalan kedalam dikotomi perdebatan yakin atau ragu; mau atau tidak; atau (dalam kacamata pemerintah) butuh *effort* sosialisasi yang lebih intens.

Diakui atau tidak, terpaan pandemi covid 19 ini sangat kuat menampar kemapanan banyak negara. Covid 19 dalam laporan organisasi internasional akan menjadi pemicu resesi global (Inman, 2020). Ini ibarat fenomena yang terjadi di awal abad ke-20 saat dunia diguncang wabah *Spanish Influenza* dan menyebabkan jutaan orang menemui kematian. Penyakit ini juga menimbulkan *great depression* dan mampu menghentikan perang dunia I (Keagen, 2020; Whiting, 2020).

Perubahan besar juga terjadi di era yang lebih kontemporer seperti mewabahnya virus yang menyebabkan sakit *Swine Flu*. Flu jenis ini bermula di Amerika Serikat, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tahun 2009. Seperti halnya covid 19, flu jenis ini juga telah menyebabkan jatuhnya korban sakit dan meninggal dunia. Akibat ekonomi yang ditimbulkan cukup besar dan mengakibatkan kontraksi ekonomi global yang serius (Aubin, 2009). Flu ini ikut membidani lahirnya sistem nasional pelayanan vaksin, khususnya di Amerika Serikat (Calmes & McNeil, 2009; Purwanto & Emilia, 2020).

Vaksin 19 jika dipandang dalam kacamata ekonomi politik bukan hanya sekedar obat atau alat peningkat imunitas tubuh dari penularan covid 19 semata. Vaksin covid 19 juga berasosiasi dengan kepentingan ekonomi politik banyak negara. Didalamnya terkandung dominasi kekuasaan bahkan hegemoni dan infiltrasi kepentingan pasar suatu negara.

Dengan kata lain, vaksin 19 berkorelasi terhadap kepentingan negara dalam kerangka menciptakan sumber-sumber kekayaan baru dan meningkatkan pendapatan. Keberadaan vaksin 19 juga - meminjam istilah Caporaso dan Lavine (2015) - merupakan bentuk dari “kekuasaan yang terkondisikan”. Sebab dalam hal ini negara membangun relasi kekuasaan dengan entitas swasta (perusahaan, kapitalis dan organisasi pekerja dan konsumen) untuk sama-sama memproduksi dan mendistribusikan kekayaan.

Kekuasaan yang terkondisi pada dasarnya merupakan situasi dalam tatanan sosial yang bekerja sedemikian rupa sehingga memuaskan kebutuhan dari beberapa kalangan tertentu dan menyesatkan kesaadran dari kalangan lain, dan mengira bahwa kepentingan dari kalangan yang diuntungkan adalah sama dengan kepentingan mereka sendiri (Caporaso & Levine, 2015).

Negara, dengan demikian, bukanlah aktor tunggal yang netral. Negara adalah *ensambel* atau kelompok kelembagaan (Hameiri & Jones, 2016), yang mencerminkan dan menanamkan hubungan kekuasaan yang berkembang secara historis. Negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya. Kebijakan-kebijakan negara mencerminkan bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang paling berkuasa menyepakati pembagian kekuasaan dan akses pada sumber daya (Choiruzzad, 2020).

Kekayaan biasanya dihubungkan dengan uang, tanah, kepemilikan atas rumah dan barang-barang konsumsi, serta berbagai macam investasi. Namun, menurut Caporaso dan Levine, kekayaan yang dimaksud lebih tepatnya adalah kepemilikan dan kendali terhadap kapital produktif. Kepemilikan dan kendali terhadap kapital produktif akan membuat kapitalis menguasai banyak orang (Caporaso & Levine, 2015).

Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, dalam batasan kepentingan secara besar, Indonesia adalah negara konsumen. Jikapun Indonesia masuk didalam konteks menciptakan kekayaan yang terkondisikan itu lebih kepada agar vaksin covid 19 bisa diterima dan diproses didalam masyarakat sendiri. Irisan seperti itu tidak bisa menempatkan negara sebagai entitas produksi, tetapi hanya sebatas pada entitas distribusi. Itulah mengapa, pemerintah sejauh ini masih terus melakukan sosialisasi agar vaksin covid 19 bisa didistribusikan secara luas ke masyarakat dan diserap untuk difungsikan secara luas pula.

Sejauh ini, vaksin covid 19 yang akan didatangkan oleh pemerintah Indonesia, porsi terbesarnya adalah impor (Bbcnews, 2020). Meski ada penyertaan perusahaan dalam negeri (BUMN) didalamnya, khususnya dalam aspek transfer teknologi dan pengetahuan (*transfer of technology and knowledge*) namun produksi secara massif masih terbatas dan butuh *effort* yang konsisten. Dengan kondisi begini, Indonesia tidak memiliki tawar menawar yang kuat, meski pangsa pasar Indonesia sangat besar. Di tengah wabah covid 19 yang terus meningkat, Indonesia tidak punya pilihan selain menerima apa adanya.

Dalam logika kekuasaan seperti ini memang Indonesia dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Di mata negara produsen covid 19, Indonesia berada

dalam posisi tawar yang lemah, yang kemudian kelemahan diri ini dimanfaatkan oleh negara lain untuk menawarkan dengan posisi harga yang tinggi (Caporaso & Levine, 2015).

Dalam kondisi yang membutuhkan, ditambah kelangkaan produk dan permintaan yang sudah pasti tinggi, maka mekanisme pasar memang berlaku. Persoalan di dalam negara adalah bagaimana agar ketersediaan terhadap vaksin juga terjaga. Maka, langkah untuk membeli di awal dan menjalin kontrak pembelian dengan perusahaan asing menjadi pilihan pemerintah.

Fungsi pemerintahan memang seperti itu, yakni memiliki tanggung jawab domestik untuk menjamin kebutuhan masyarakat (Rasyid, 2000). Namun, pemerintah tak seharusnya hanya memikirkan soal ketersediaan. Ada hal krusial lain yang tak kalah genting, yakni memastikan bahwa pemerintah tidak menjadikan rakyat sebagai pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan bertindak selayaknya perusahaan yang berupaya memperoleh kekuasaan pasar (*market power*) (Caporaso & Levine, 2015).

Pemerintah diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan tujuan bernegara dan mengkonstruksikan tujuan penyelesaian covid 19 dengan memaksakan logika pasar kepada rakyat (Chabibi, 2019). Jika menggunakan logika pasar, maka pasar memiliki kekuasaan “mengendalikan” negara untuk menyediakan semua komoditas yang mendukung keberlangsungan pasar (kapitalisme). Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur, kebijakan kompetisi dan segala urusan yang terkait dengan kepentingan pasar.

Oleh karena itu, negara harus memiliki prinsip-prinsip didalam penentuan regulasi terkait mekanisme pasar, yaitu: (1) mengenai efisiensi, pasar harus dibangun secara sosial melalui serangkaian peraturan yang disepakati atau diberlakukan dalam permainan. (2) tidak ada mekanisme pemasaran alami atau spontan sehingga perlu diatur sebaik mungkin oleh pemerintah. (3) prinsipnya sederhana, kalau pasar itu menggunakan prinsip *equilibrium* maka ia adalah hasil dari kepatuhan terhadap sebuah peraturan (Boyer & Drache, 1996). Dengan kata lain, negara harus mengambil peran besar untuk memastikan kebijakan lebih terarah dan tuntas.

Pemerintah harus melihat kondisi saat ini dimana rakyat masih dalam kondisi terpuruk akibat dampak covid 19 ini. Kenormalan baru hanya merubah budaya keseharian perilaku dan aktivitas, tanpa bisa merubah keadaan ekonomi masyarakat pada kenormalan yang layak. Lantas, apakah negara tidak boleh sepenuhnya mendapatkan keuntungan? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan pula, apakah negara tega menghitung keuntungan di tengah-tengah penderitaan rakyat yang terdampak covid 19?

KESIMPULAN

Perspektif ekonomi politik berbasis negara pada dasarnya menempatkan negara sebagai sentrum dari berbagai kepentingan kelompok (swasta) dan masyarakat menjadi kepentingan nasional. Kresner dalam Caporaso dan Levine (2015) menjelaskan bahwa negara dalam hal ini sebagai institusi yang bertanggung jawab menetapkan nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan kegunaan bagi masyarakat.

Empirisnya, perlakuan negara dari vaksin covid 19 adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses induksi nilai. Dengan kata lain, secara sederhana, pemerintah sekali lagi, harus melihat kondisi masyarakat lebih terbuka dan melihat pula kemampuan objektif masyarakat saat ini. Jika tidak mungkin, maka pemerintah perlu berkorban dalam kondisi rugi sekalipun (Rosyida, 2020). Jika sudah ada keselarasan nilai seperti itu, maka 100% kesadaran masyarakat akan tumbuh atas kegunaan vaksin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Aubin, D. (2009). *Swine flu dampens economy*. Reuters. <https://uk.reuters.com/article/uk-financial/swine-flu-dampens-economy-idUKTRE53Q0TP20090427>
- Bbcnews. (2020). *Covid-19: Indonesia targetkan impor vaksin pada Desember, relawan: “uji klinis belum selesai kok sudah pesan vaksin jadi?”* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54723381>

- Boyer, R., & Drache, D. (1996). *States Against Market; The Limits of Globalization*. London: Routledge.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Calmes, J., & Jr, D. G. M. (2009). *Swine Flu Is Widespread in 46 States as Vaccines Lag*. Gainesville.Com. <https://www.gainesville.com/news/20091025/swine-flu-is-widespread-in-46-states-as-vaccines-lag>
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2015). *Teori-Teori Ekonomi Politik* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chabibi, M. (2019). Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic (IIJSE)*, 1(2), 16–28.
- Choiruzzad, S. A. B. (2020). *Memahami ekonomi politik penanganan COVID-19*. The Conversation. <https://theconversation.com/memahami-ekonomi-politik-penanganan-covid-19-137224>
- CNNIndonesia. (2020). *Survei: Hanya 64,8 Persen Masyarakat RI Mau Divaksin Corona*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031162756-20-564421/survei-hanya-648-persen-masyarakat-ri-mau-divaksin-corona>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Terj)* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gerth, H. H., & Mills, C. W. (1958). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Hameiri, S., & Jones, L. (2016). Rising powers and state transformation: The case of China. *European Journal of International Relations*, 22(1), 72–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354066115578952>
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lulus Uji Klinis*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/15243391/jokowi-jelaskan-alasan-pemerintah-beli-vaksin-covid-19-yang-belum-lolos-ujiklinis?page=all>.
- Inman, P. (2020). *A hundred years on, will there be another Great Depression?* The Guardian. <https://www.theguardian.com/business/2020/mar/21/100-years-on-another-great-depression-coronavirus-fiscal-response>
- Keagen, W. (2020). *We forget that flu once plagued the economy as coronavirus does today*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/business/2020/may/03/flu-once-plagued-economy-coronavirus-war-great-depression>
- KemenkesRI. (2020). *Situasi Covid 19*. Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id/index.php>

- MacIver, R. M. (1926). *The Modern State*. New York: Oxford University Press.
- Miller, C. (2020). *Covid19 Crisis: Political and Economic Aftershock*. Foreign Policy Research Institute. <https://www.fpri.org/article/2020/03/covid-19-crisis-political-and-economic-aftershocks/>
- Purwanto, E. A., & Emilia, O. (2020) (ed). New Normal Sebagai Jalan Tengah?: Kesehatan vs. Ekonomi dan Alternatif Kebijakan Dalam Pandemi COVID-19. In *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasyid. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rosyida, N. Z. (2020). *Pemerintah Dituding Cari Untung Lewat Vaksin Covid-19 Berbayar, Erick Thohir Buka Suara*. Portaljember.Pikiran-Rakyat.Com. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16717451/pemerintah-dituding-cari-untung-lewat-vaksin-covid-19-berbayar-erick-thohir-buka-suara>.
- Sari, H. P. (2020). *Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah Artikel ini*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>
- Walliman, N. (2011). *Research Methods; The Basics*. London: Routledge.
- Whiting, K. (2020). *A science journalist explains how the Spanish flu changed the world*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-how-spanish-flu-changed-world/>
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>